

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi Notaris (2). Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pendirian persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Adapun issue hukum dalam tesis ini adalah adanya pertentangan norma dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang persekutuan perdata notaris. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah (1). Bagaimana pengaturan pendirian persekutuan perdata bagi Notaris ? (2). Apa akibat hukum pendirian persekutuan perdata notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia? Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah yang membahas mengenai bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta teknik analisis bahan hukum dengan inventarisasi, sistemisasi dan interpretasi semua peraturan perundang-undangan terkait dan bahan-bahan hukum sehingga mendapat jawaban yang benar dan valid atas suatu penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pasal 16 ayat (1) huruf f yang membahas mengenai kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris, dimana adanya kekaburan norma dengan Pasal 20 ayat (1) UUJN. Adanya perjanjian diantara para notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah para pihak akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidak berpihakkan, kemandirian, menjaga rahasia serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak terkait.

Kata Kunci : *Notaris, Persekutuan Perdata Notaris*

ABSTRACT

The aims of this research are (1). To find out and analyze the arrangements for the establishment of a civil partnership for a Notary (2). To find out and analyze the legal consequences of the establishment of a notary civil partnership on the implementation of the notary position in the perspective of legislation in Indonesia. The legal issue in this thesis is the existence of a conflict of norms due to the absence of special regulations governing notary civil partnerships. The problems that will be investigated in this thesis are (1). What are the arrangements for establishing a civil partnership for a Notary? (2). What are the legal consequences of the establishment of a notary civil partnership on the implementation of the position of a notary in the perspective of legislation in Indonesia? The research methodology used is a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach that discusses primary, secondary and tertiary legal materials as well as legal material analysis techniques with an inventory, systemization and interpretation of all relevant laws and regulations and materials. - legal materials so that they get correct and valid answers to a research. The results of this study are Article 16 paragraph (1) letter f which discusses the confidentiality of the deed made by a Notary, where there is a vagueness of norms with Article 20 paragraph (1) UUJN. The existence of an agreement between notaries in a Notary civil partnership regarding whom the client will appear does not conflict with honesty, impartiality, independence, keeping secrets and prioritizing the interests of the client as a related party.

Keywords: Notary, Civil Notary Guild